

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penyajian	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2.2. Analisis Kinerja	11
2.3. Isu – isu Tupoksi Inspektorat	13
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN	14
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	14
3.2. Visi, Misi, tujuan dan sasaran	15
3.3. Program dan Kegiatan	20
BAB IV PENUTUP	28

BAB

I	PENDAHULUAN
----------	--------------------

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan Yang Baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan serta cita-cita bangsa.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP no. 08 Tahun 2008;
5. Perda Provinsi Kepri No. 02 Tahun 2009 tentang RPJP Prov Kepri Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 07) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016;
8. Keputusan Inspektur Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Inspektorat dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2017 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017. Renja juga merupakan acuan dalam penentuan pilihan - pilihan program kegiatan tahunan.

Dokumen Renja ini juga disusun dengan tujuan sebagai barometer untuk mengukur dan melakukan evaluasi terhadap kinerja tahunan. Selain itu juga bertujuan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja

Sistematika penulisan Renja Tahun 2017 disusun ke dalam bab - bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat rumusan tentang latar belakang, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah, Maksud dan Tujuan, Proses dan Sistematika Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan.

- Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Memuat Kebijakan Inspektorat Daerah Tahun 2011 – 2016
dan Memuat Program Utama dan Kegiatan Prioritas
Inspektorat.
- Bab IV Penutup
Memuat kesimpulan, berbagai harapan dan tindak lanjut
pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun
tahun 2017.

BAB

II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap jalannya RENSTRA 2011-2016 dapat dilihat melalui perkembangan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah selama satu tahun pada tahun keempat yaitu di tahun 2014 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi Renja tahun lalu 2015 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2017. Secara garis besar dapat dilihat dari table berikut ini :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016
Kabupaten Karimun

Inspektorat Daerah

Lembar :

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 (Akhir priode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2015	Realisasi Renja SKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2016)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Wajib									
1	01			Bidang Urusan Pemerintahan									
1	01	01		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH									
1	01	01	01	Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler dilingkungan Pemkab Karimun	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	160 laporan	120	135	131	97%	70	281	100%
1	01	01	03	Monitoring TLHP Eksternal dan Internal	Persentase temuan hasil pemeriksaan tahun lalu yang telah ditindaklanjuti dalam waktu yang telah ditentukan	95%	90	90	100%	100%	90%	90%	100%
1	01	01	04	Review Pengadaan Barang Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun	Jumlah Laporan Hasil Review	12 laporan	12 laporan	12 laporan	9 laporan	100%	9 laporan	24 Llaporan	100%
1	01	01	05	Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Karimun	Persentase temuan yang diselesaikan ditindaklanjuti	95%	-	95%	51,8%	54,52%	95%	54,52%	100%
1	01	01	06	Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS)	Persentase permasalahan yang selesai ditindaklanjuti	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	01	07	Montoring & Evaluasi pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil	2 laporan	1 laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Inspektorat Daerah

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 (Akhir priode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
							Target Renja SKPD tahun 2015	Realisasi Renja SKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2016)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
				Inpres No. 5 Tahun 2004	Monev							
1	01	01	08	Pemantauan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemkab Karimun	Jumlah unit kerja yang diidentifikasi	5 Uk	5 Uk	12 Uk	12 UK	100%	NA	NA
1	01	01	09	Evaluasi LAKIP Dinas, Kantor dan Instansi di lingkungan Pemkab Karimun	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	24 laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	20 Laporan	24 Laporan
1	01	01	10	Monitoring Proyek Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2014	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 laporan	1 laporan
1	01	01	11	Tindaklanjuti Percepatan Penyelesaian Kerugian Daerah	Persentase Hasil Laporan yang selesai ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
1	01	01	12	Fasilitas Pengsian dan Penyampaian LHKPN Pemkab. Karimun	Jumlah pejabat yang mengisi LHKPN	100 org	NA	65 org	32 org	49%	100 org	32 org
1	01	01	12	Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan	Jumlah Komputer yang sudah teraplikasi	NA	NA	8 buah	8 buah	100%	NA	8 Buah
1	01	02		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1	01	02	01	Penyusunan LAKIP Kabupaten Karimun	Jumlah LAKIP yang siap dicetak	15 buah	15 buah	15 buah	15 buah	100%	15 buah	15 buah
1	01	02	02	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun	Jumlah Laporan Hasil review	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan
1			03	Penyusunan LAKIP Inspektorat	Jumlah LAKIP yang siap	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	100%	4 buah	4 buah

Inspektorat Daerah

Lembar :

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2016 (Akhir priode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2015	Realisasi Renja SKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2016)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	01	02		Daerah	dicetak								
1	01	05		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan									
1	01	05	01	Pelatihan Penjenjangan Aparatur Pengawasan	Jumlah Yang mengikuti Pelatihan	31 orang	10 orang	12 orang	12 orang	100%	15 orang	15 orang	100%
1	01	05	02	Penyusunan Pedoman Pengawasan / Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan	Jumlah Pedoman yang siap dicetak	6 buah	NA	6 buah	6 buah	100%	NA	6 buah	100%
1	01	06		Program Perencanaan Pembangunan Daerah									
1	01	06	01	Penyusunan RENJA Inspektorat Daerah	Jumlah RENJA yang siap dicetak	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	100%	4 buah	4 buah	100%
1	01	06	02	Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran	Jumlah Paket yang tersedia SKPD melalui Pameran	1 stand pameran	1 stand pameran	1 stand pameran	1 stand pameran	100%	1 stand pameran	1 stand pameran	100%
1	01	07		Program Peningkatan Prasarana Aparatur									
1	01	07	01	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan yang dibeli	NA	NA	2 unit	2 unit	100%	NA	2 unit	100%

2.2. Analisis Kinerja

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam menentukan tolok ukur dan indikator kinerja perlu dilakukan analisis pencapaian kinerja. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah di nilai berdasarkan Indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 tahun 2014. Analisis pencapaian kinerja tersebut disajikan dengan format sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Karimun

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis Tahun 2014
				Tahun 2013 (thn n-2)	Tahun 2014 (thn n-1)	Tahun 2015 (tnn n)	Tahun 2016 (thn n+1)	Tahun 2013 (thn n-2)	Tahun 2014 (thn n-1)	Tahun 2016 (tnn n)	Tahun 2017 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Pengembalian kerugaian daerah ke kas daerah			NA	15%	15%	15%	NA	10,46%			Penyetoran kerugian daerah sebesar Rp718.673.224,45 (10,46%) dari total kerugian sebesar Rp. 6.869.969.091,69 (69,73)
2.	Opini BPK terhadap LKPD			NA	WTP	WTP	WTP	NA	WTP			Opini BPK utk 2 tahun berturut turut meraih opini WTP (100%)
3.	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti			NA	80%	90%	100%	NA	72,37%			Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti sebanyak 545 di tahun 2014 dari 753 yang ditargetkan. (90,47%)
4.	Persentase Pejabat Negara dan PNS dilingkungan Pemkab. Yang melaporkan LHKPN			NA	80%	90%	100%	NA	96,6%			Sesuai sk bupati sebanyak 150 realisasi diasumsikan dari 80% sebanyak 120 pejabat, realisasi tahun 2014 sebanyak 117 pejabat (97,5%)
5.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda			NA	> 65	>68	>70	NA	>65,21			Penilaian LAKIP Pemda tahun 2013 kategori B dengan nilai 65,21 (100,32)
6.	Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori "B"			NA	15 UK	20 UK	24 UK	NA	6 UK			Adapun penilaian LAKIP dengan kategori B sebanyak 6 SKPD atau hanya mencapai 40%
7.	Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP dilingkungan kerjanya			NA	10 SKPD	20 SKPD		NA	12 SKPD			Skpd yang menerapkan SPIP sebanyak 12 dengan capaian 120%
8.	Persentase Pegawai Inspektorat yang menguasai SPIP			NA	30%	35%	35%	NA	18,75%			30% target yang ditetapkan dengan asumsi sebanyak 9 pegawai dan 32 pegawai inspektorat namun realisasi hanya sebanyak 6 pegawai atau 18,75%

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis Tahun 2014
				Tahun 2013 (thn n-2)	Tahun 2014 (thn n-1)	Tahun 2015 (tnn n)	Tahun 2016 (thn n+1)	Tahun 2013 (thn n-2)	Tahun 2014 (thn n-1)	Tahun 2016 (tnn n)	Tahun 2017 (thn n+1)	
9.	Persentase penerbitan laporan hasil pemeriksaan tepat waktu			NA	80%	90%	100%	NA	5,18%	100%	100%	Sesuai PKPT pemeriksaan sebanyak 135 obrik dengan asumsi 80% atau sebanyak 108 obrik laporan hasil pemerisakaan tepat waktu, reasliasi hanya mencapai 7 obrik atau sebesa 5,18% (6,47%)
10.	Persentase Pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan.			NA	85%	90%	100%	NA	95,5%	100%	100%	Sesuai PKPT pemeriksaan sebanyak 135 obrik dengan asumsi 80% atau sebanyak 108 obrik, reasliasi mencapai 129 obrik atau sebasa 95,5%

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Inspektorat, maka dapat dirumuskan isu – isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.

Perumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat.

Isu – isu strategis yang dihadapi dilihat dari faktor internal adalah ***terbatasnya kualitas SDM yang memadai***, sedangkan dari faktor eksternal adalah ***masih lemahnya pengendalian intern dari masing – masing unit kerja***.

BAB

III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagai tahun pertama dari pelaksanaan Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun periode 2016 – 2021, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kondisi ini sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk menjadi pedoman , pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program atau kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Misi, Visi, Tujuan dan sasaran organisasi dan terangkum dalam uraian sebagai berikut:

- Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan;
- Peningkatan kinerja dan mutu layanan di semua aspek layanan "*public service*";
- Tertib administrasi pemerintahan.

3.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI

Visi sebagai suatu keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan melalui suatu proses dan sistem yang terstandarisasi akan memacu suatu lembaga atau institusi untuk mencapai kondisi ideal yang diinginkan. Kondisi ideal yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Karimun telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021. Untuk itu sebagai bagian integral dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, maka perwujudan Visi dan Misi Inspektorat diselaraskan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah, di mana Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun adalah :

**Visi : ""TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN
SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS
MARITIM YANG TERDEPAN BERLANDASKAN IMAN DAN
TAQWA"**

B. MISI

Pernyataan Misi merupakan gambaran tentang kegiatan utama organisasi. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi guna mendukung visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Inspektorat Kabupaten Karimun yang diselaraskan dengan Misi Kabupaten Karimun adalah Mewujudkan birokrasi yang professional, bersih dan melayani. (Terdepan dalam Pelayanan Birokrasi).

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang dapat menggambarkan hasil akhir yang dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.

Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan (*performance indicator*). Tujuan dapat menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan untuk lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua program dan kegiatan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi, Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun menetapkan 2 (dua) tujuan untuk priode 2016-2021, yaitu :

- 1). Meningkatkan Transparan dan Akuntabel Pemerintahan;
- 2). Meningkatkan Peran Inspektorat Dearah sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan.

B. SASARAN

Sasaran yang dimaksud di sini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan. Penetapan sasaran didasari atas isu-isu strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan faktor kunci keberhasilan, sejalan dengan proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi dana dan sumber daya

ke dalam kegiatan atau operasional untuk pencapaian kinerja yang diinginkan.

Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasi indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada periode tahun tertentu. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing-masing.

Adapun sasaran yang dapat diidentifikasi untuk diwujudkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun dalam kurun waktu 2016–2021 sebagaimana dinyatakan dalam usulan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun dan sasaran yang dapat diidentifikasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

TABEL. 3.2				
TUJUAN DAN SASARAN				
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan transparan dan akuntabel Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	- Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (WTP)	WTP
			- Persentase hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti	100%
			- Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan	1 mg sblm batas waktu
		Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	- Zona Integritas terhadap jumlah ODP	0%
			- Persentase Pejabat Negara dan PNS dilingkungan Pemkab. Yang melaporkan LHKPN	80%
			- Persentase Pengembalian kerugaian daerah ke kas daerah	7%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja unit kerja	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda	> 74
			- Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori "B"	50%
2.	Meningkatkan Peran Inspektorat Daerah sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan	Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	- Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP dilingkungan kerjanya	30%
			- Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	100%
		Meningkatnya kualitas tugas pokok dan fungsi	- Persentase penerbitan laporan hasil pemeriksaan tepat waktu	50%
			- Persentase Pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan.	85%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi. kebijakan organisasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk program yang terangkum dalam uraian sebagai berikut :

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Program ini ditujukan guna peningkatan kualitas pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional Internal Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

3. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang berlaku.

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur di unit kerja.

6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas disiplin aparaturnya di masing – masing unit kerja.

B. KEGIATAN.

Kegiatan merupakan tindakan nyata Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis organisasi dan tertuang dalam formulir : **Rencana Kerja Program Tahunan (RKPT 2016 - 2021)**. Adapun yang merupakan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 adalah sbb:

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

- a. Pemeriksaan regular dilingkungan Pemkab. Karimun sesuai dengan PKPT ;
- b. Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) dalam rangka Peningkatan Mutu Hasil Pengawasan dan Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pembahasan PKPT;
- c. Review Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemkab. Karimun;
- d. Gelar Pengawasan Daerah;
- e. Peningkatan Maturitas SPIP Kabupaten Karimun;
- f. Penyelenggaraan Forum Penataan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemkab. Karimun;
- g. Evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan Pemkab. Karimun;
- h. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

- i. Monitoring Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal, Pemantauan Tindaklanjut Audit berdasarkan Aplikasi SIM HP;
- j. TindakLanjut Percepatan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- k. Penguatan Akuntabilitas Melalui Peningkatan Penyampaian LHKPN;
- l. Sistem Informasi dan Pelaporan Kinerja SKPD;
- m. Pemeriksaan Fisik Kas SKPD dalam rangka penutupan tahun anggaran;
- n. Monitorring Proyek Pembangunan Kab. Karimun;
- o. Monev Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Sosialisasi Anti korupsi;
- p. Audit Operasional Penerimaan Daerah
- q. Peningkatan Pemahaman Proses Hukum Kasus Indikasi TPK;
- r. Reviu RKA SKPD;
- s. Review Laporan Keuangan daerah Kabupaten Karimun;
- t. Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Reformasi di Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan;
- u. Implementasi Zona Integritas di Lingkungan Pemkab. Karimun;
- v. Reviu Laporan Kinerja Pemda Karimun;
- w. Peningkatan efektifitas monev program dana bergulir Kab. Karimun;
- x. Audit tujuan tertentu terhadap pelaksanaan nilai sisa kontrak/SPK
- y. Peningkatan dan Ketertiban keamanan permanen dan current file hasil audit;
- z. Peningkatan Level Kapabilitas Inspektorat Daerah;
- aa. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat;

- bb. Fasilitasi dan Kerjasama Pengendalian Pungutan Liar;
- cc. Verifikasi Data Pendukung Pelaporan Pelaksanaan aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2017

2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan

- a. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja;
- b. Pelatihan penjenjangan aparaturngawasan;
- c. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparaturngawasan;

3. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

- a. Penyusunan Pedoman Pengawasan / Kebijakan Pedoman Teknis di bidang pengawasan;
- b. Pembuatan Buku Saku Auditor.

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Penyusunan Renstra SKPD;
- b. Penyusunan Renja SKPD;
- c. Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Mebeleur;
- b. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor;

6. Program Peningkatan disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

7. Program Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran

- a. Peningkatan Pelayanan Administarsi Umum dan Operasional Perkantoran

Program - program dan kegiatan - kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dijelaskan di atas diharapkan dapat menjawab tantangan dan tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Karimun dalam memberikan keyakinan yang memadai (assurance activities), memberikan peringatan dini (anti corruption activities), meningkatkan kualitas (consulting activities) penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Karimun

Nama SKPD : Inspektorat Daerah

lembar 1 dari 4

NO	SASARAM	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	RENANA TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		LOKASI
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (WTP) Persentase hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksana kebijakan KDH						
			1. Monitoring Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal pemantauan tindaklanjuti hasil audit berdasarkan aplikasi SIM HP	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti	2 laporan	200	2 laporan	200	Kab. Karimun
			2. Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) dalam rangka peningkatan mutu hasil pengawasan dan Pembahasan PKPT	Jumlah Laporan Hasil Rapat koordinasi	4 Laporan	200	4 Laporan	200	Karmun, Tg. Pinang, Jakarta
			3. Gelar Pengawasan	Jumlah Peserta Rapat	60 orang	200	60 orang	200	Kab. Karimun
			4. Reviu Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun	Jumlah Laporan Hasil Reviu	1 Laporan	200	1 Laporan	200	Kab. Karimun
	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Zona Integritas (terhadap jumlah OPD) Persentase Pejabat Negara dan PNS dilingkungan Pemkab. Yang melaporkan LHKPN Persentase Pengembalian kerugaian daerah ke kas daerah	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksana kebijakan KDH						
			1. Pemeriksaan Fisik Kas SKPD dalam rangka penutupan tahun anggaran	Jumlah SKPD yang dilakukan Pemeriksaan Fisik	40 SKPD	100	40 SKPD	100	Kab. Karimun
			2. Verifikasi Data Pendukung Pelaporan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2017	Jumlah SKPD yang diverifikasi	4 SKPD	250	4 SKPD	250	Kab. Karimun
			3. Reviu RKA SKPD	Jumlah SKPD yang direviu	40 SKPD	250	40 SKPD	250	Kab. Karimun
			4. Penguatan Akuntabilitas Melalui Peningkatan Penyampaian LHKPN	Jumlah Pejabat/ Pegawai yang wajib LHKPN	120 orang	150	125 orang	150	Kab. Karimun
			5. Monev Percepatan Korupsi dan Sosialisasi Anti Korupsi	Jumlah Peserta sosialisasi	150 orang	200	150 orang	200	Kab. Karimun

NO	SASARAM	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	RENANA TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		LOKASI
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
			6. Tindaklanjuti Percepatan Penyelesaian Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah	1 laporan	300	1 laporan	300	Kab. Karimun
			7. Peningkatan Pemahaman Proses Hukum Kasus Indikasi TPK	Jumlah Peserta Forum	60 orang	200	60 orang	200	Kab. Karimun
			8. Implementasi Zona Integritas d lingkungan Pemkab. Karimun	Jumlah Unit Kerja yang Dipantau/ diidentifikasi	6 SKPD	250	10 SKPD	250	Kab. Karimun
			9. Fasilitasi dan Kerjasama Pengendalian Pungutan Liar	Jumlah Kegiatan Saber yang difasilitasi	8 kali	900	8 kali	900	Kab. Karimun
	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja unit kerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori "B"	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksaaan kebijakan KDH						
			1. Penyelenggaraan Forum Penataan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemkab. Karimun	Jumlah Peserta Forum	100 orang	200	100 orang	200	Kab. Karimun
			2. Evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan Pemkab Karimun	Jumlah LAKIP SKPD yang di evaluasi	30 Laporan	200	35 Laporan	200	Kab. Karimun
			3. Sistem Informasi Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Pelaporan Kinerja yang teraplikasi	40 SKPD	250	40 SKPD	250	Kab. Karimun
			4. Reviu Laporan Kinerja Pemda Karimun	Jumlah Laporan yang direviu	1 Laporan	150	1 Laporan	150	Kab. Karimun
			Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksaaan kebijakan KDH						
	1 Terciptanya Reformasi Birokrasi di bidang pengawasan	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP dilingkungan kerjanya Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	1. Peningkatan Maturitas SPIP Kabupaten Karimun	Jumlah Unit Kerja yang Dipantau/ diidentifikasi Penyelenggaraan SPIP	6 SKPD	200	10 SKPD	200	Kab. Karimun
			2. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Unit Kerja yang Dinilai	6 SKPD	200	10 SKPD	200	Kab. Karimun
			3. Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Reformasi di Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan	Jumlah Laporan Monev	1 Laporan	200	1 Laporan	200	Kab. Karimun

NO	SASARAM	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	RENANA TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		LOKASI
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
2.	Meningkatnya kualitas tugas pokok dan fungsi	Persentase penerbitan laporan hasil pemeriksaan tepat waktu Persentase Pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH						
			1. Pemeriksaan Reguler di lingkungan Pemkab. Karimun sesuai dengan PKPT	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditndaklanjuti	40 LHP	2.300	50 LHP	2.500	Kab. Karimun
			2. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Di lingkungan Pemkab. Karimun Tahun 2016	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa yang akan direviu	12 Paket	100	12 Paket	100	Kab. Karimun
			3. Audit Operasional Penerimaan Daerah	Jumlah laporan Hasil Audit	1 Laporan	200	1 Laporan	200	Kab. Karimun
			4. Monitoring Proyek Pembangunan Kab. Karimun	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	1 Laporan	100	1 Laporan	100	Kab. Karimun
			5. Peningkatan efektifitas Monev Program Dana Bergulir Kab Karimun	Jumlah debitur yang dilakukan Monev	100 orang	500	100 orang	500	Kab. Karimun
			6. Audit tujuan tertentu Pelaksanaan Nilai sisa Kontrak/ SPK	Jumlah laporan Hasil Audit	1 Laporan	500	1 Laporan	500	Kab. Karimun
			7. Peningkatan Level Kapabilitas Inspektorat Daerah	Tingkat level yang dipenuhi	2	200	2	200	Kab. Karimun, Batam, TPI
			8. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat	Jumlah Laporan Kinerja yang siap dicetak	6 Buah	40	6 Buah	40	Kab. Karimun, JKT
			9. Peningkatan dan ketertiban keamanan permanen dan current file hasil audit	Jumlah dokumen yang diarsipkan dengan baik	150 dok	70	150 dok	70	
			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan						
			1. Pembuatan Buku Saku Auditor	Jumlah Buku Saku yang siap dicetak	-	-	100 buku	100	Kab. Karimun
			2. Penyusunan Pedoman Pengawasan / Kebijakan Pedoman Teknis di bidang Pengawasan	Jumlah SOP yang siap dicetak	6 buah	100	6 buah	100	Kab. Karimun
			Peningkatan Profisionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan						
			1. Pelatihan penjenjangan aparatur pengawasan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	31 orang	500	31 orang	500	JKT, TPI, BTM, Ciawi
			2. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan.	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	31 orang	700	31 orang	700	JKT, TPI, BTM, Ciawi

NO	SASARAM	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	RENANA TAHUN 2017		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		LOKASI
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	
			3. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	31 orang	400	31 orang	400	JKT, TPI, BTM, Ciawi
			Perencanaan Pembangunan Daerah.						,
			1. Penyusunan Renja Inspektorat	Jumlah Buku yang siap dicetak	6 Buah	40	6 Buah	40	Kab. Karimun
			2. Penyusunan Renstra Inpektorat Daerah	Jumlah Buku yang siap dicetak					
			3. Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran	Jumlah Paket yang tersedia	1 stand pameran	100	1 stand pameran	100	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
			1 Pengadaan Meubelair	Jumlah paket yang tersedia	1 paket	250	1 paket	250	Kab. Karimun
			Peningkatan Disipln Aparatur						
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian yang dibeli	100 pasang	200	100 pasang	200	Kab. Karimun
			Pelayanan Administrasi Perkantoran						
			1 Pelayanan Administrasi Umum dan Perkantoran	persentase tercapainya operasional kantor	100%	1.000	100%	1.100	Kab. Karimun
						12.150		12.500	

BAB

IV	PENUTUP
-----------	----------------

1. Kesimpulan

Untuk menjamin agar kegiatan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka sebuah sistem perencanaan yang baik merupakan syarat mutlak untuk tercapainya tujuan. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah merupakan bagian dari rencana kerja tahunan yang menggambarkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Adapun prioritas pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah adalah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran - sasaran pembangunan.
2. Memiliki sasaran - sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya.
3. Kegiatan tersebut sifatnya mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
4. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Renja tahun 2017 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Beberapa harapan dengan adanya Renja 2017, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terkordinasi sesuai dengan tujuan dan sasaran berikut berbagai indikator yang telah ditetapkan.
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan Program dan Kegiatan di Inspektorat Daerah .
3. Mengakomodasikan berbagai aspirasi, perkembangan maupun perubahan yang terjadi, yang belum terprediksi dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2016-2021.

Akhirnya, indikator keberhasilan pelaksanaan Renja akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaksana program dan kegiatan sehingga sasaran organisasi yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.